

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, menetapkan bahwa Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Penasehat : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengarah : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
2. Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
5. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Ketua Dewan Redaksi

(Editor)

: Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.

Anggota Dewan Redaksi

(Section Editor)

: 1. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
2. Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
3. Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
4. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.
5. Haryono, S.Sos, M.H.
6. Imam Lukito, S.T., M.H.
7. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si.

Redaksi Pelaksana

Sekretaris

: Fitriyani, S.H., M.Si.
: 1. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
2. Asmadi, S.H.

Tata Usaha

: 1. Lindung Budi Mulyawan, S.H.
2. B. Lora Christyanti, S.IP.

Desain Grafis

dan Teknologi Informasi

: 1. Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)
2. Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)
3. Harysandy Permana, S.Kom. (Teknologi Informasi)

Alih Bahasa

: Harry Fonte Sugiarto
(Interlingua Translation Centre)

Alamat Redaksi:

Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Fax. 021-2522954

balitbangkumham@gmail.com

ejournalkebijakan@gmail.com

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bebestari yang telah menelaah naskah sehingga dapat diterbitkan.

1. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., L.L.M., Ph.D
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
(Hukum Tata Negara/Kewarganegaraan/Imigrasi/HAM)

2. Prof. Dr. Muhamamd Fauzan, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
(Hukum Tata Negara)

3. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(Kriminologi)

4. Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia - Makassar
(Hukum Pidana)

5. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
Fakultas HUKUM Universitas Islam Indonesia
(Hukum Kekayaan Intelektual)

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN (ARTICLES)

1. Analisis Kebijakan Penerapan Kembali Asas Domisili Dalam Permohonan Paspor RI: Pendekatan Normatif, Sosiologis Dan Pelayanan Publik..... 265-282
Andry Indrady
2. Implementasi Mekanisme Pemberian Hukuman Disiplin di Kementerian Hukum dan HAM 283-310
Oki Wahyu Budijanto
3. Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan 311-322
Wicipto Setiadi, Rakha Aditya Afrizal
4. Evaluasi Pelaksanaan *Community-Based Corrections* di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai 323-338
Hakki Fajriando
5. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan *Overcrowded* pada Lembaga Pemasyarakatan 339-358
Insan Firdaus

TINJAUAN HUKUM (REVIEW)

6. Ratio Legis dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia 359-378
Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari
7. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming 379-398
Antonio Rajoli Ginting

HALAMAN KOSONG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkaraan suatu penerbitan jurnal ilmiah di berbagai lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Pada terbitan Volume 13 Nomor 3 Bulan November 2019 ini, kami memuat hasil-hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia, diantaranya di bidang Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Pemasyarakatan, Hukum dan Peradilan, serta Keimigrasian yang terbit kali ini. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum terbitan ini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga mutu dan kualitas tulisan tetap terjaga sesuai analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM serta dari Institusi / Akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikel/tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka dalam menerima kritik dan saran konstruktif sebagai perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di masa yang akan mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

HALAMAN KOSONG

Volume 13, Nomor 3, November 2019

**p-ISSN 1978 - 2292
e-ISSN 2579 - 7425**

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

HALAMAN KOSONG

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Andry Indrady

Domicile Basis in the Indonesian Passport Policy: Normative, Sociological and Public Service Approaches

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 3, November 2019

The proposal to implement domicile basis on the Indonesian travel document policy as the policy output of the Directorate General of the Republic of Indonesia of the Ministry of the Republic of Indonesia is projected to attract public attention. The purpose of this paper is to examine such proposal by using a number of theoretical accounts: legal-normative, sociology and also public service and utilising triangulation method derived from primary, secondary and participant observation components. The discussion held in this paper concentrating on the combining theoretical, normative and opinions from relevant stakeholders to gain multidimensions perspectives vis a vis the initiative to implement passport service based on domicile. It is concluded that from theoretical, normative and stakeholders' point of views, the policy is a positive tool especially in enhancing security approach. In the recommendations components it is recommended that along with the implementation of passport service based on domicile, such policy has to be complimented by stricking the balance between immigration law enforcement and better service quality improvement to reach the policy goals effectively and efficiently.

Keywords: *domicile basis; passport; policy analysis*

Oki Wahyu Budijanto

Implementation Of Mechanism Giving Disciplinary Punishment In The Ministry Of Law and Human Rights

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 3, November 2019

The Inspectorate General of the Ministry of Law and Human Rights still faces obstacles including differences in the data of disciplinary penalties. The problem is how the implementation of the mechanism of disciplinary employee punishment and form of recovery for an employee who has served disciplinary punishment? The purpose of this paper is to investigate the implementation of the mechanism for granting disciplinary staff and their form of remedies. This paper uses qualitative methods with primary and secondary data collection techniques. The implementation of disciplinary punishment for employees has not gone well, which requires a long time and the lack of understanding of officials in the Ministry of Law and Human Rights. The form of reparation for an employee who has served an disciplinary sentence is implicit in the form of coaching, and the form of recovery has been accommodated in the imposition of moderate and severe disciplinary penalties. Suggestions for improvement: a) Development of an integrated monitoring system for staffing management information systems (SIMPEG) in the on-line discipline module. b) Education and training related to the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 23 Year 2015 through the e-learning method for officials.

Keywords: *mechanism; discipline punishment; recovery*

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Wicipto Setiadi, Rakha Aditya Afrizal

Implication of Visa-Free Policy Based on The Presidential Regulation Regarding Visa-Free Visit: Employment Perspective

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 3, November 2019

In order to improve the relations of the Republic of Indonesia with other countries, it is necessary to provide facilities for foreign citizens to enter the territory of the Republic of Indonesia which is implemented in the form of exemption from the obligation to have a visitor visa by observing the principle of reciprocity and the principle of benefits. The Government of Indonesia issued Presidential Regulation No. 21 of 2016 concerning Visa Free Visit. The regulation was made in order to provide benefits to improve the economy in general and increase the number of tourist arrivals in particular. This study uses normative juridical methods by prioritizing library data derived from primary, secondary and tertiary sources analyzed descriptively. The discussion is directed at the implications of the application of visa-free policies in an employment perspective and how the government deals with them. The results showed that the application of visa-free has significant implications in the field of employment, especially in the case of illegal foreign workers who infringe visa-free policies, weak control from the government, and weak regulations regarding the use of foreign workers.

Keywords: *implications for visa-free; labor; illegal foreign workers*

Hakki Fajriando

The Evaluation of Community-Based Corrections in Rumbai Class 3 Open Correctional Facility

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 3, November 2019

The open correctional facility, a relatively novel system in Indonesia, has been an essential element of the criminal justice and correctional system. The existence of this correction type is closely linked to the community-based corrections system that emphasizes the active contribution of the society in the reintegration process of the assimilated inmates. This article aims to evaluate the the extent of realization of community-based corrections concepts in the daily function of The Rumbai Class 3 Open Correctional Facility. By using empiric juridical research approach, qualitative methods were used to collect the data by utilizing in-depth interview and article analysis. The results showed that community-based corrections concept has not yet been fully implemented in Rumbai Class 3 Open Correctional Facility. The causes : problems in location, target population, and system selections, lack of resources, lack of personnel quantity in addition to their lack of skills and subsequent training, as well as lack of support from other stakeholders. Therefore, it is recommended for Directorate General of Corrections to increase the quantity and quality of human resources and also the facilities and amenities in Rumbai Class 3 Open Correctional Facility. It is also suggested for Rumbai Class 3 Open Correctional Facility to enhance their collaboration with third parties, especially in connection with the assimilation process of the inmates to work outside of the correctional facilities.

Keywords: *corrections; open correctional facility; community-based corrections*

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Insan Firdaus

The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts In Correctional Institutions

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 3, November 2019

Overcrowded inmates of prisons is a major problem in managing the correctional system. The number of overcrowded increases every year and occurs in almost all Penal Institutions in Indonesia. One effort to overcome the overcrowded problem is to increase the role of correctional adviser in reducing the number of prisoners. The problem of this research is how the role of correctional adviser in overcrowded Handling in Correctional Institutions. The research is emperical juridical and uses a qualitative approach supported by quantitative data. Correctional adviser play an important role in the process of restorative justice, social reintegration, and coaching and rehabilitation. Based on data in the correctional database system, the success of the diversion process in the juvenile justice process is quite high, this has an impact on the reduced number of children before the law who are serving sentences at the Special Child Development Institute. In the social reintegration program the Community Guidance have an active role in granting the rights of prison-assisted citizens to serve their sentence outside the Correctional Institution. Correctional adviser also play a role in fostering prisoners who are conducting community research in risk assessment and needs that are useful for correctional institutions conducting guidance and rehabilitation of narcotics. Therefore, to increase the role of the correctional adviser in overcrowded the Directorate General of Corrections must increase the competency and quantity of human resources supervisors, and increase the number of correctional centers and increase the budget of social guidance.

Keywords : *overcrowded, correctional institution, correctional adviser*

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari

The Ratio Legis and Impacts of Dual Citizenship Stipulation in Indonesian Citizenship Law

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 3, November 2019

In principle, Indonesian Citizenship Law does not recognize the existence of dual citizenship. Law No. 12/2006 regulates dual citizenship which only limited to the children in relation to the protection of children's rights. However, along with the developments in the modern world, the demands of the Indonesian diaspora towards the Indonesian Government to grant dual citizenship status for adults is more intense. This research raises two legal issues related to this matter. First, this research scrutinizes the ratio legis of Law No. 62/1958 and Law No. 12/2006 which not allowing dual citizenship for Indonesian citizens. Second, it examines the impact, particularly in legal field, if dual citizenship is applied in Indonesia. The purpose of this study is to conduct an analysis of the legal issues above. The study finds that Law No. 62/1958 and Law No. 12/2006 adhere to the doctrine of perpetual allegiance. Both of them stipulate that the form of the loyalty of Indonesian citizens to the country is by not having dual citizenship. If dual citizenship is applied in Indonesia, one of the impacts in legal field is there should be changes to the provisions of the law relating to property ownership, political rights, citizenship and immigration. This research suggests that the Indonesian Government needs to respond carefully with regard to the dual citizenship status for the adults. The Government of Indonesia have to conduct further studies as well as make some considerations involving various related agencies.

Keywords: *dual citizenship; Indonesian citizenship; citizenship law; Indonesian law*

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Antonio Rajoli Ginting

The Role of National Collective Management Institutions In The Rise of Music Streaming Applications

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 3, November 2019

Music as part of arts has copyrights that should be protected. In case of commercial purposes, the song's creator, copyright holder and the owner of related rights has an economic rights in the forms of royalty. The rising of digitalization has facilitated people need to enjoy music everywhere and every time through digital music streaming apps. However, in the other hand this technology has put economic rights in the jeopardy. This paper would like to examine the mechanism of royalty management and the role of LMKN on managing royalty in digital music streaming. This paper uses a qualitative method with descriptive data analysis. Based on a study on the practice of royalty management, royalty is given for every song played in digital music apps. Music streaming Apps distribute royalty undirectly through Collective Management Institution (Lembaga Manajemen Kolektif/ LMK). Afterward, LMK will forward the royalty to the rightsholders. Nation Collective Management Institution (LMKN) attempted to take a bigger role in the royalty management by repairing Indonesia Music Database and establishing minimum tariff that guarantees musician' need. In the end of the paper, I offer recommendation about the way royalty should be collected and what kind of regulation should be conducted in order to collect royalty from various digital music apps.

Keywords : LMKN; royalty; digital music streaming apps

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Andry Indrady (Politeknik Imigrasi, BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI)

Analisis Kebijakan Penerapan Kembali Asas Domisili dalam Permohonan Paspor RI: Pendekatan Normatif, Sosiologis dan Pelayanan Publik

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 3, November 2019

Rencana penerapan asas domisili sebagai salah satu kebijakan berkaitan dengan dokumen perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI diproyeksi akan menjadi sorotan masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dengan beberapa pendekatan ilmiah terhadap rencana kebijakan asas domisili dalam permohonan paspor dengan perspektif normatif, sosiologis dan pelayanan publik dengan metode penelitian triangulasi yang menggabungkan komponen data primer, sekunder dan observasi partisipan. Pembahasan dalam tulisan ini akan menggunakan kombinasi pendekatan teoritis, normatif maupun data wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran umum terhadap permasalahan rencana penerapan kebijakan paspor berbasis domisili. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa penerapan paspor berbasis domisili secara teoritis, normatif maupun pendapat dari beberapa pemangku kepentingan dinilai positif terutama dalam aspek pengawasan keimigrasian yang juga secara paralel diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Saran yang diusulkan adalah penerapan kebijakan paspor berbasis domisili dengan menyeimbangkan aspek penegakan hukum maupun pelayanan keimigrasian.

Kata kunci: asas domisili; paspor; analisa kebijakan

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Oki Wahyu Budijanto (Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Implementasi Mekanisme Pemberian Hukuman Disiplin di Kementerian Hukum dan HAM

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 3, November 2019

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih menghadapi kendala diantaranya adalah perbedaan data hukuman disiplin yang dimiliki. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana implementasi mekanisme pemberian hukuman disiplin pegawai dan bentuk pemulihan bagi seorang pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin? Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi mekanisme pemberian hukuman disiplin Pegawai dan bentuk pemulihannya. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Implementasi pemberian hukuman disiplin pegawai belum berjalan dengan baik, dimana membutuhkan waktu lama dan minimnya pemahaman pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bentuk pemulihan bagi seorang pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin bersifat implisit berupa pembinaan, dan bentuk pemulihan telah diakomodir pada penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Saran perbaikan: a) Pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada modul disiplin on-line. b) pendidikan dan pelatihan terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2015 melalui metoda e-learning kepada pejabat.

Kata kunci: mekanisme; hukuman disiplin; pemulihan

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Wicipto Setiadi, Rakha Aditya Afrizal (Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta)

Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 3, November 2019

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi warga negara asing untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Peraturan tersebut dibuat dalam rangka memberikan manfaat untuk meningkatkan perekonomian pada umumnya dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan lebih mengutamakan data kepustakaan yang berasal dari sumber primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif. Pembahasan diarahkan pada bagaimana implikasi pemberlakuan kebijakan bebas visa dalam perspektif ketenagakerjaan dan bagaimana cara pemerintah mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan bebas visa memiliki implikasi yang cukup besar dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam kasus tenaga kerja asing ilegal yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa, masih lemahnya pengawasan dari pemerintah, dan belum optimalnya peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Kata kunci: implikasi bebas visa; ketenagakerjaan; tenaga kerja asing ilegal

**Hakki Fajriando (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)**

Evaluasi Pelaksanaan *Community-Based Corrections* di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 3, November 2019

Lapas Terbuka, yang relatif baru dikenal di Indonesia, telah menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana dan sistem masyarakat. Keberadaan Lapas terbuka tidak bisa dilepaskan dari prinsip *community-based corrections* yang mengedepankan peran serta masyarakat dalam proses reintegrasi narapidana yang tengah diasimilasikan. Tulisan ini berupaya untuk menganalisis sejauh mana penerapan ketentuan-ketentuan konsep *community-based corrections* telah dilaksanakan dalam operasionalisasi Lapas terbuka di Lapas terbuka Kelas III Rumbai. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *community-based corrections* belum benar-benar dapat dilaksanakan di Lapas terbuka Kelas III Rumbai. Penyebabnya: lokasi dan kondisi geografis Lapas, proses seleksi WBP yg belum optimal, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta kurangnya kerjasama dengan stakeholder lain, Disarankan agar Ditjen Masyarakat meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di Lapas terbuka Kelas III Rumbai. Lapas terbuka Kelas III Rumbai juga disarankan untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya terkait program asimilasi bagi narapidana untuk bekerja di luar Lapas.

Kata kunci: masyarakat; lapas terbuka; *community-based corrections*

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Insan Firdaus (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan *Overcrowded* pada Lembaga Pemasyarakatan

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 3, November 2019

Overcrowded penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan masalah utama pengelolaan sistem pemasyarakatan. Jumlah *overcrowded* meningkat tiap tahun dan terjadi di hampir semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah *overcrowded* adalah meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengurangi jumlah warga binaan pemasyarakatan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peranan pembimbing kemasyarakatan dalam Penanganan *Overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian bersifat yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung data yang bersifat kuantitatif. Pembimbing kemasyarakatan berperan penting dalam proses restorative justice, reintegrasi sosial, dan pembinaan dan rehabilitasi. Berdasarkan data di sistem database pemasyarakatan, keberhasilan proses diversifikasi pada proses peradilan anak cukup tinggi, hal ini berdampak pada berkurangnya anak berhadapan hukum yang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam program reintegrasi sosial Pembimbing Kemasyarakatan berperan aktif dalam pemberian hak warga binaan pemasyarakatan menjalani hukuman di Luar Lembaga Pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan, assesment resiko dan kebutuhan yang berguna bagi Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan dan rehabilitasi narkotika. Oleh karena itu, Untuk meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani *overcrowded* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus meningkatkan kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, dan menambah jumlah balai pemasyarakatan serta menambah anggaran bimbingan kemasyarakatan.

Kata kunci: *overcrowded*; lembaga pemasyarakatan; peranan pembimbing pemasyarakatan

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari (Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

***Ratio Legis* dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 3, November 2019

UU No. 62/1958 dan UU No. 12/ 2006 pada prinsipnya tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda. UU No. 12/ 2006 memperbolehkan kewarganegaraan ganda terbatas pada anak-anak dalam kaitannya perlindungan terhadap hak anak. Namun, seiring dengan perkembangan dalam dunia modern, tuntutan diaspora Indonesia terhadap Pemerintah RI untuk juga memberikan status kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa terus bergulir. Penelitian ini mengangkat dua isu hukum. Isu hukum pertama mengenai *ratio legis* tidak diperbolehkannya kewarganegaraan ganda dalam UU No. 62/1958 dan UU No. 12/2006. Isu hukum kedua adalah dampaknya terutama dalam bidang hukum apabila kewarganegaraan ganda diberlakukan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan sejarah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap isu hukum yang telah diajukan. Berdasarkan penelitian ini, kedua undang-undang tersebut tidak terlepas dari filosofi kewarganegaraan yang didasarkan pada doktrin “kesetiaan abadi” (perpetual allegiance). Kedua undang-undang tersebut mengatur bahwa bentuk kesetiaan WNI kepada negara nya adalah dengan tidak mempunyai kewarganegaraan ganda. Sedangkan dampaknya dalam bidang hukum apabila kewarganegaraan ganda diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah perubahan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan kepemilikan properti, hak politik, kewarganegaraan dan Imigrasi. Penelitian ini memberikan saran bahwa tuntutan kewarganegaraan ganda dari komunitas diaspora Indonesia perlu direspon oleh Pemerintah Indonesia dengan dicermat dengan melakukan pengkajian dan penyusunan pertimbangan yang melibatkan berbagai instansi terkait.

Kata kunci: kewarganegaraan ganda; kewarganegaraan Indonesia; hukum kewarganegaraan; hukum Indonesia

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Antonio Rajoli Ginting (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 3, November 2019

Sebuah lagu sebagai bagian dari karya seni yang dilindungi hak ciptanya. Apabila lagu tersebut dipakai untuk tujuan komersil maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait berhak mendapatkan hak ekonominya berupa royalti. Dalam konteks perkembangan dunia yang serba digital, perlindungan hak ekonomi menghadapi tantangan yang besar. Digitalisasi semakin memudahkan masyarakat untuk menikmati lagu dimanapun menggunakan aplikasi musik streaming. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan royalti musik pada aplikasi musik streaming dan bagaimana upaya LMKN dalam mengelola royalti pada aplikasi musik streaming. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Mekanisme pengelolaan royalti pada aplikasi musik streaming dengan cara memberikan royalti untuk lagu yang distreaming oleh pengguna. Royalti diberikan melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya memberikannya kepada pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait. Upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam mengelola royalti dari aplikasi musik streaming adalah dengan memperbaiki database musik yang ada di Indonesia, kemudian menentukan tarif yang sesuai untuk sebuah royalti dari lagu yang diputar pada aplikasi musik streaming. Adapun saran dari penulis adalah segera membuat aturan yang tepat untuk pengumpulan royalti di aplikasi musik streaming dan alur pengumpulan yang jelas dari aplikasi musik streaming ke pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait.

Kata kunci: LMKN; royalti; aplikasi musik streaming

HALAMAN KOSONG